

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUNSHINE POLICY
SEBAGAI BENTUK UPAYA KOREA SELATAN DALAM
PROSES REUNIFIKASI DENGAN KOREA UTARA
PADA MASA KEPEMIMPINAN KIM DAE JUNG
TAHUN 1998 – 2002**

Vinesha Anindita

*Program Studi Hubungan Internasional
FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur*

e-mail: vineshao2@gmail.com

ABSTRACT

The Sunshine Policy policy was the first policy to unite South Korea's and South Korea's diplomatic relations following the outbreak of the 1950 Korean War. From the time of Park Chung Hee's leadership to Kim Young Sam, it has not been able to create a policy that provides a resolution to the conflict on the Korean Peninsula. Kim Dae Jung with the Sunshine Policy policy provides a solutive policy in reconciliation and reunification efforts on the Korean Peninsula. The approach used in the implementation process of Sunshine Policy policy in this research is through 3 theoretical approaches are track one diplomacy, soft power, and foreign aid. Through these three approaches, the Sunshine Policy policy is considered to have been successfully implemented, namely from the response and proactive attitude of North Korea.

Keywords: *Sunshine Policy, strategic moves, track one diplomacy, soft power, foreign aid*

Kebijakan Sunshine Policy merupakan kebijakan pertama yang mampu menyatukan hubungan diplomatik Korea Selatan dan Korea Utara pasca pecahnya Perang Korea 1950. Dari masa kepemimpinan Park Chung Hee hingga Kim Young Sam, belum mampu membuat kebijakan yang memberikan resolusi terhadap konflik di Semenanjung Korea. Kim Dae Jung dengan kebijakan Sunshine Policy memberikan kebijakan yang solutif dalam upaya rekonsiliasi dan reunifikasi di Semenanjung Korea. Sunshine Policy merupakan bentuk dari strategic moves Korea Selatan yang kemudian diimplementasikan selama masa pemerintahan Kim Dae Jung. Pendekatan yang digunakan dalam proses implementasi kebijakan Sunshine Policy dalam penelitian ini adalah melalui 3 pendekatan teoritis yaitu track one diplomacy, soft power, dan foreign aid. Melalui ketiga pendekatan tersebut kebijakan Sunshine Policy dianggap berhasil terimplementasikan yaitu dari respon dan sikap proaktif dari Korea Utara. Kendala-kendala yang terjadi diakhir jabatan Kim Dae Jung dan menyulut kembali tensi militer di Semenanjung Korea, walaupun begitu, Sunshine Policy telah sempat memberikan perdamaian di Semenanjung Korea.

Kata Kunci: *Sunshine Policy, pergerakan strategis, diplomasi trek pertama, soft power, bantuan luar negeri*

Pendahuluan

Pasca Perang Korea 1950-1953, Korea Selatan dan Korea Utara disibukkan untuk normalisasi hubungan negara dan pembangunan. Seperti halnya Korea Selatan yang melalui pemimpin terpilihnya, Park Chung Hee, yang membuat negara makmur dan kuat secara militer (*buguk kangbyong*) pada tahun 1960-an-1970-an (Rozman, *et al*, 2008: 34). Pada tahun 1980-an dibawah kepemimpinan Chun Doo Hwan, politik Korea Selatan cenderung pada upaya-upaya diplomatik bilateral maupun multilateral, pembangunan ekonomi serta meningkatkan ekistensi negaranya pada panggung internasional. Hingga akhir 1980-an, belum ada wacana kebijakan Korea Selatan untuk melakukan reunifikasi Semenanjung Korea dengan Korea Utara. Kesulitan utama Korea Utara pasca perang Korea adalah Utara menganut diplomasi *brinkmanship* yang menyebabkan kesulitan secara administrasi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam pencapaian konsensus tentang bagaimana membuat kesepakatan dengan Korea Utara dan program nuklirnya yang telah meninggalkan permasalahan yang mengakar (Jong, 2013).

Pada periode 1989 hingga 1992 ditandai dengan dua perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya (Rozman *et al*, 2008 : 135). Pertama, kedua negara menyetujui untuk mendukung reunifikasi setelah mengetahui elemen umum dalam usulan bersama yang diusulkan oleh konfederasi Selatan dan federasi Utara pada tahapan yang lebih rendah. Kedua, pada akhir Perang Dingin terdapat upaya dari Moskow, Beijing, dan Tokyo untuk menjalan formula dengan Pyongyang untuk proses normalisasi semenanjung yang bertujuan memperkuat pengaruh hubungan Utara dan Selatan. Pada masa kepemimpinan Roh Tae Woo, penghargaan pada masanya dalam hubungan Korea Selatan dan Korea Utara adalah *the Agreement on Reconciliation, Non-Aggression, and Exchange and Cooperation*, yaitu perjanjian kerjasama perdamaian yang ditandatangani dan disetujui oleh Korea Utara (Rozman, *et al*, 2008 : 136). Pendekatan terhadap Korea Utara pada masa kepemimpinan Roh Tae Woo yang tepat saat dimulainya krisis nuklir Korea Utara pada tahun 1993 (Jong, 2013). Pada masa ini, kebijakan presiden Roh Tae Woo tidak berjalan semestinya dan masih diiringi tensi militer serta ancaman nuklir dari Korea Utara.

Semenanjung Korea dan wacana reunifikasi tampaknya masih akan terus menjadi wacana dikedua negara. Pararel 38 masih akan terus menjadi perebutan halus tentang siapa yang akan mengambil alih kontrol. Rezim Korea Utara secara kuat mengontrol daratan utara dari paralel 38 dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melepaskan serta tidak peduli seberapa banyak retorika yang dibayarkan untuk reunifikasi (Jong dan Rozman, dalam Rozman *et al*, 2008: 129). Korea Utara memiliki posisi diplomatik yang tidak seperti negara-negara lain, yaitu, "*contact the U.S and block the South*" (Kwon, 2014). Pembicaraan mengenai Semenanjung Korea berarti berbicara mengenai dua hal yang kontras, karena (1) Korea Utara akan menuju *collapse* baik dengan atau tanpa tekanan dari luar, dan (2) Korea Selatan akan terjadi kegaduhan selama proses reunifikasi yang pada ada dasarnya Korea Utara masih sulit untuk melepas paralel 38 (Rozman *et al*, 2008 : 129).

Gagasan reunifikasi mulai digaungkan setelah terpilihnya presiden Kim Young Sam yang mulai menjabat pada Februari 1993. Kim Young Sam merupakan presiden pertama yang berasal dari sipil. Hal ini yang membuat kebijakan-kebijakan Kim Young Sam terhadap Korea Utara menjadi lebih lunak. Menurut

In Taek Hyun (2008), terpilihnya presiden Kim Young Sam menjadi strategis karena awal tahun 1990an merupakan berakhirnya Perang Dingin global dan demokratisasi Korea Selatan serta Kim Young Sam merupakan presiden terpilih pertama. Salah satu tantangan Kim Young Sam yang menjadikan dilema berkelanjutan adalah bagaimana membuat kesepakatan dengan Korea Utara yang sering kali mengambil langkah dramatis dari penggunaan senjata nuklir yang dapat berdampak pada negara lain (In, 2008 : 55).

Salah satu paradoks dari kebijakan presiden Kim Young Sam yang menjadikan kebijakan reunifikasi dengan Korea Utara dianggap tidak efektif adalah turut campurnya Amerika Serikat dalam implementasi kebijakannya. Pada 16 April 1996 presiden Kim Young Sam melakukan pertemuan dengan presiden Amerika Serikat Bill Clinton di Pulau Jeju dan mengajukan proposal untuk *four way talks* antara Amerika Serikat, Korea Selatan, China, serta Korea Utara (In, dalam Rozman *et al*, 2008: 60). Pada pidatonya di hari kemerdekaan Korea Selatan 15 Agustus 1996, presiden Kim Young Sam mengumumkan bahwa Selatan tidak akan tergesa-gesa untuk melakukan reunifikasi dengan kondisi Utara yang masih tidak stabil dan terisolasi sehingga sulit untuk melakukan pergerakan secara cepat.

“Diplomacy in the 21st century will center around economy and culture. We must keep expanding trade, investment, tourism and cultural exchanges in order to make our way in the age of boundless competition which will take place against a backdrop of cooperation.” (Kim Dae-jung 1998)

Berbeda dengan presiden Kim Young Sam yang kebijakannya tidak berfokus pada reunifikasi Semenanjung Korea, pada masa pemerintahan presiden Kim Dae Jung instrumen kebijakan yang dibuat lebih berfokus pada rekonsiliasi dan reunifikasi Semenanjung Korea. Pemerintahan Korea Selatan dibawah Kim Dae Jung berfokus pada dialog bilateral dan rekonsiliasi serta kooperasi untuk keuntungan bersama. Korea Selatan menginisiasi kebijakan yang bernama *Sunshine Policy* yang bertujuan untuk merekonsiliasi kondisi politik kedua negara dan melakukan berbagai kerjasama. *Sunshine Policy* merupakan sebuah prestasi karena mampu membuka pertemuan dan pembicaraan langsung antara Korea Selatan dan Korea Utara tanpa adanya ikut campur dari Amerika Serikat (Kwon, 2014).

Tinjauan Teoritis

Dalam menganalisa kebijakan *Sunshine Policy* ini, penulis menggunakan kerangka konseptual yaitu *strategic moves*, *track one diplomacy*, *soft power*, dan *foreign aid*. *Strategic moves* digunakan untuk menganalisis hasil dari gagasan seseorang untuk mengambil keputusan. Sedangkan *track one diplomacy*, *soft power*, dan *foreign aid*, digunakan untuk menganalisa implementasi dai kebijakan *Sunshine Policy*.

Strategic moves merupakan konsep turunan dari *game theory* yang menjelaskan mengenai bagaimana mengambil sikap untuk negosiasi dalam konflik. Menurut Deborah M. Kolb dalam karyanya yang berjudul *Strategic Moves and Turn* menuliskan bahwa *strategic moves* merupakan aksi dari negosiator yang mengambil posisinya dalam proses negosiasi. *Strategic moves* adalah tentang

pengambilan sikap yang strategis untuk menjadikannya langkah yang solutif dalam resolusi konflik.

Negosiasi dan mediasi adalah utama metode non koersif dimana aktor dalam konflik menyelesaikan perselisihan mereka (Bercovith dan Jackson, 2001). Bercovith dan Jackson sendiri mendefinisikan negosiasi sebagai proses dimana negara-negara dan aktor-aktor lain berkomunikasi dan proposal pertukaran dalam upaya untuk setuju tentang dimensi pemutusan konflik dan hubungan masa depan mereka. Logika dasar yang ingin disampaikan oleh Bercovith dan Jackson adalah bahwa penyelesaian konflik melalui negosiasi dan mediasi disadari penuh oleh kedua pihak yang berkonflik bahwa mereka termotivasi untuk memilih bekerjasama dan melihat keuntungan bersama dalam penyelesaian konflik.

Peneliti berasumsi bahwa definisi dan penjabaran mengenai negosiasi di atas memiliki keterkaitan dengan *track one diplomacy*. Argumentasi dari hal tersebut adalah bahwa *track one diplomacy* menggunakan upaya negosiasi melalui aktor negara secara langsung dalam upaya penyelesaian konflik. Sejalan dengan *track one diplomacy*, *soft power* memiliki azas yang sama dalam upaya negosiasi yaitu penggunaan *power* dengan cara non koersif. Jika ditelaah lebih lanjut melalui hal di atas bahwa kedua belah pihak yang melakukan negosiasi sadar dan termotivasi untuk bekerjasama, maka argumen ini terkait dengan upaya bantuan luar negeri (*foreign aid*) oleh satu pihak terhadap lain. Bantuan luar negeri (*foreign aid*) memiliki peranan penting dalam membangun *bonding* antara pemberi bantuan dan penerima bantuan.

Track One Diplomacy atau biasa disebut dengan *official diplomacy* menurut De Magalhaes (1998) merupakan instrumen dari kebijakan luar negeri untuk pembuatan dan pengembangan kontak antara pemerintah yang berbeda negara melalui penggunaan perantara yang satu sama lain diakui oleh masing-masing pihak (Mapendere, 2001). Dalam *A Dictionary of Diplomacy* karya G. R. Berridge dan Alan James (2003) mendefinisikan *track one diplomacy* sebagai sebuah jalan tengah atau jalan mediasi yang diupayakan oleh satu atau lebih negara, atau organisasi internasional. Penggunaan dari *Track One Diplomacy* merupakan diplomasi yang berhubungan dengan relasi *government to government* (G to G). Interaksi antara negara secara langsung yang mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri dari negara tersebut. hal tersebut dibawa oleh *diplomats*, posisi tinggi yang terdapat dalam pejabat pemerintahan, kepala negara (presiden ataupun perdana menteri), dan ditujukan untuk mempengaruhi struktur kekuatan politik.

Robert A. Dahl dalam karyanya yang berjudul, "*Modern Political Analysis* " (2004) mendefinisikan *power* sebagai, "*the ability to get another actor to do what it would not otherwise have done (or not to do what it would have done)*". Penggunaan *power* tentu memiliki kerumitan dalam proses mempengaruhi suatu kebijakan. Jika dalam mempengaruhi kebijakan suatu negara, kekuatan militer atau secara koersif dirasa tidak memberikan hasil efektif maka *soft power* merupakan salah satu jalan keluarnya. Jika dilihat dari akarnya, *power* memiliki definisi yang abstrak sehingga bukan hanya bagaimana definisi atau mendefinisikannya tetapi bagaimana melihat aktor dapat memiliki *power*. Karena *power* itu seperti cinta, lebih mudah untuk mengalami daripada mendefinisikan atau mengukur (Nye, 2004 : 1). Joseph S. Nye Jr mendefinisikan *power* sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku pihak lain untuk

mendapatkan hasil yang pihak pertama inginkan (Nye, 2004 : 2). Secara umum, banyak yang menganggap bahwa *power* merupakan cara yang digunakan salah satu pihak terhadap pihak lain melalui paksaan. Banyak yang menganggap bahwa sebuah negara yang kuat adalah yang memiliki teritorial dan populasi yang besar, sumberdaya alam yang luas, kuat secara ekonomi, kekuatan militer, dan stabilitas sosial (Nye, 2004 : 3).

Nancy Qian (2014) mendefinisikan *foreign aid* sebagai salah satu alat kebijakan yang penting yang negara kaya gunakan untuk membantu negara miskin meningkatkan kesejahteraan populasi, fasilitasi ekonomi, dan pembangunan institusi. *Foreign aid* atau bantuan luar negeri telah menjadi instrumen kebijakan luar negeri yang digunakan pasca perang dunia kedua. Bahkan, pada tahun 1970 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menspesifikasikan bantuan luar negeri bahwa negara kaya harus memberikan bantuan luar negeri 0,7% dari GNP (*gross national product*) untuk negara-negara miskin melalui ODA (*official development aid*).

Metodologi

Tipe penelitian dari tulisan ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini akan menjabarkan dan memaparkan data dengan analisis mendalam dengan menggambarkan objek penelitian. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) merujuk pada tipe pertanyaan penelitian, rancangan dan analisis data yang akan diterapkan pada topik yang dibahas (Knupfer dan Mclellan, t.t). Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif karena memberikan gambaran yang jelas dan detil mengenai suatu permasalahan. Penelitian deskriptif pada dasarnya dapat digunakan untuk penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif. Tipe penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan penjabaran data melalui pengujian teori.

Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya, sehingga, jika alat pengambil data cukup reliabel dan valid, maka datanya akan reliabel dan valid (Suryabrata, 2012: 38). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah kualitatif. Sumber utama dari penelitian ini menggunakan data sekunder yang biasanya sudah tersusun dalam bentuk-bentuk dokumen (Suryabrata, 2012: 39). Penelitian ini menggunakan data-data yang diambil dari literatur hubungan internasional. Sumber data yang digunakan sebagian besar diperoleh dari buku-buku hubungan Internasional. Data juga didapat melalui sumber internet yang tentunya dengan sumber yang kredibilitasnya dapat dipercaya seperti *e-journal* dan laman resmi. Data yang terkumpul kemudian diolah dan diseleksi atas reliabilitas dan validitasnya (Suryabrata, 2012: 40). Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dalam menganalisis data. Data deskriptif hanya dianalisis menurut isinya, karena itu, analisis semacam ini juga disebut sebagai analisis isi (*content analysis*) (Suryabrata, 2012: 40).

Hasil Penelitian

Kebijakan penyatuan dengan Korea Utara atau yang dikenal sebagai *Sunshine Policy* telah dibuka secara informal pada 19 Desember 1997, hari setelah Kim Dae Jung memenangkan pemilihan presiden dan mengisyratkan bahwa dirinya

datang untuk menyiapkan penyelesaian isu (Shinn, 2001). Kebijakan *Sunshine Policy* merupakan kebijakan yang dibuat untuk memulai kembali hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara dengan berazaskan *flexible dualism* yang memisahkan antara hubungan politik dan ekonomi. Kebijakan ini dicanangkan oleh presiden Korea Selatan terpilih untuk tahun 1998 hingga tahun 2002. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah awal yang cukup signifikan mengingat pada rentang waktu 1998 hingga 2002 hubungan Korea Selatan dan Korea Utara dapat dianggap tenang secara politik.

Melalui kebijakan *Sunshine Policy*, Kim Dae Jung ingin mengupayakan perdamaian di Semenanjung Korea. *Sunshine Policy* dibuat untuk meningkatkan hubungan diplomatik yang damai antara Korea Selatan dan Korea Utara. Reunifikasi merupakan tujuan utama dari kebijakan ini, namun, pada dasarnya menjaga stabilitas politik yang damai tanpa harus menggunakan tensi militer dalam penyelesaian konflik. Keseriusan Korea Selatan ini mendapat respon positif dari Korea Utara.

Sunshine Policy merupakan sebuah prestasi karena mampu membuka pertemuan dan pembicaraan langsung antara Korea Selatan dan Korea Utara tanpa adanya ikut campur dari Amerika Serikat (Kwon, 2014). Melalui posisi diplomatik Korea Utara di atas dapat dilihat bahwa Korea Utara memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap Amerika Serikat. Korea Utara menganggap bahwa Selatan (sebutan Korea Utara untuk Korea Selatan) merupakan boneka yang dimainkan oleh Amerika Serikat. Namun, melalui *Sunshine Policy*, ketika kebijakan ini diimplementasikan, kapanpun Korea Utara menaikkan level ancaman keamanan baik dalam bentuk misil ataupun gestur yang menunjukkan provokasi secara militer, *Sunshine Policy* akan membawanya pada meja diskusi baik secara domestik maupun internasional (Kwon, 2014).

Presiden Kim Dae Jung sendiri dilantik pada Februari 1998. Pada pidato inaugurasinya, Presiden Kim Dae Jung menyampaikan dan menjelaskan bahwa Korea Selatan akan membangun *inter-Korean relations* dengan mendukung rekonsiliasi dan kerjasama antara kedua Korea dan menetapkan perdamaian di antara keduanya (*Ministry of Reunification*, 2001:20). Dilihat dari pernyataan Kim Dae Jung tersebut terdapat konsistensi yang ingin dijaga untuk terwujudnya rekonsiliasi dan reunifikasi. Konsistensi Kim Dae Jung diuji ketika terpilihnya berada di tengah-tengah krisis ekonomi 1997-1998. Kim Dae Jung memunculkan kepemimpinan yang kritis untuk mengatasi krisis finansial disaat dirinya harus memegang teguh visinya untuk *inter-Korean reconciliation* yang komprehensif dan menegakkan perdamaian dan kemakmuran di Asia Timur (Snyder dalam Rozman *et al*, 2008:78).

Segera, setelah pernyataan yang diberikan oleh Kim Dae Jung pada Deklarasi Berlin, Korea Utara dengan melalui berbagai saluran rahasia, mengajukan penawaran terhadap Korea Selatan sebuah pertukaran perwakilan spesial (*Ministry of Reunification*, 2001:31). Korea Utara melalui perwakilan rahasia ini menyampaikan keinginannya untuk membahas lebih lanjut tentang *Inter-Korean Summit* yang ditawarkan oleh Korea Selatan. Pyongyang memberikan respon positif terhadap penawaran Korea Selatan, setelah tidak adanya pertemuan diplomatik antara kedua negara pasca pecahnya Perang Korea .

Close-door contact yang pertama antara perwakilan spesial tersebut mengambil tempat antara Menteri Park dan Wakil Ketua Song Ho Kyong *Asia-Pacific Peace*

Committee (APPC) Korea Utara di Shanghai pada 17 Maret 2000 (*Ministry of Reunification*, 2001:32). Selanjutnya, pada tanggal 8 April 2000, dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk *Inter-Korean Summit*. Pada tanggal 10 April 2000, Seoul dan Pyongyang secara serentak mengumumkan perjanjian yang disepakati. Persiapan-persiapan mengenai rencana pertemuan kedua negara dipersiapkan secara matang yang digelar kedua Korea pada tanggal 22 April sampai 18 Mei 2000 di Panmunjom. Pertemuan ini merupakan pertemuan level pemerintah pertama setelah tahun 1994.

Upaya Korea Selatan dalam memperjuangkan rekonsiliasi pada tingkat pemerintah, akhirnya membuahkan hasil. Pertemuan resmi kedua negara digelar di Pyongyang pada tanggal 13 hingga 15 Juni 2000. Pertemuan kedua negara ini digelar untuk pertama kalinya setelah 55 tahun. Sebanyak 130 delegasi Korea Selatan berangkat menuju Pyongyang termasuk jurnalis dan repoter untuk mendampingi dan mengawal jalannya *Inter-Korean Summit* yang merupakan sejarah baru pada proses rekonsiliasi dan reunifikasi Korea. Pada pertemuan ini menghasilkan *South-North Joint Declaration* dan *South-North Agreement*. *Inter-Korean Summit* merupakan pencapaian hubungan diplomatik terbesar dalam sejarah proses reunifikasi Semenanjung Korea.

Korea Selatan dan Korea Utara menyepakati perjanjian dan adanya *mutual trust* diantara kedua negara. Presiden Kim Dae Jung menandai pada 4 isu, yaitu (1) rekonsiliasi dan unifikasi nasional; (2) penenangan tensi dan menegakkan perdamaian; (3) ekspansi dari pertukaran dan kerjasama inter Korea; (4) reuni keluarga yang terpisah (*Ministry of Reunification*, 2001:36-37). Pertemuan sebelumnya merupakan pertemuan yang diselenggarakan dan mempertemukan langsung Presiden Korea Selatan Kim Dae Jung dan kepala negara Korea Utara Kim Jung Il. Pertemuan-pertemuan pada level pemerintah, secara bertahap terus dilakukan untuk meneruskan dialog inter Korea. Kesepakatan demi kesepakatan terus dicapai dan menunjukkan progresivitas yang terus berkembang.

Salah satu perhatian khusus yang diajukan oleh Presiden Kim Dae Jung adalah pengembangan sektor privat dan meningkatkan potensi pariwisata kedua negara. Hal yang ditekankan oleh Kim Dae Jung adalah meningkatkan kunjungan dari Selatan ke Utara maupun sebaliknya. Relasi hubungan melalui pembangunan kerjasama pariwisata merupakan upaya Korea Selatan memperkuat relasi diplomatik dengan cara yang lebih lunak. Seperti pada bab pertama penelitian ini, dalam implementasinya, Korea Selatan dengan pengaplikasian *soft power* melalui kerjasama pembangunan pariwisata. Kerjasama pariwisata ini mencakup data kunjungan oleh warga dari Selatan ke Utara maupun kunjungan oleh warga Utara ke Selatan. Kerjasama pembangunan dan pengembangan potensi wisata Gunung Kumgang oleh pemerintah Korea Selatan dan Korea Utara.

Perhatian lain yang menjadi fokus utama pemerintah Korea Selatan adalah isu keluarga yang terpisah yang disebabkan oleh Perang Korea. Kim Dae Jung menganggap bahwa isu kemanusiaan keluarga yang terpisah ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah Korea Selatan. Maka dari itu, Presiden Kim Dae Jung membawa gagasan reuni keluarga ini dalam *Inter-Korean Summit*. Hasilnya adalah isu keluarga yang terpisah masuk dalam *South-North Joint Declaration* yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dasar pemikiran dari pemisahan kerjasama sektor privat dari usaha di sektor publik, proyek ini telah disetujui oleh pemimpin Korea Selatan dan Korea Utara yang diluncurkan pada November 1998 oleh kelompok bisnis Hyundai sebagai bagian dari *30-years plan* untuk membangun kompleks turis atau *resort* di Gunung Kumgang yang terletak di Korea Utara, yang tepatnya 13 mil utara *Demilitarized Zone* (DMZ) (Shinn, 2001). Kim Dae Jung mengupayakan pembangunan dan pengembangan potensi wisata di Gunung Kumgang ini sebagai upaya dan bentuk keseriusan Korea Selatan tidak hanya pada politik tingkat tinggi namun juga pada sektor lain. Peran Grup Hyundai disini adalah sebagai swasta yang diberikan tanggung jawab penuh dalam proses pembangunan dan pengembangan Gunung Kumgang sebagai tempat pariwisata. Pemerintah Korea Selatan sendiri bertindak sebagai penanggungjawab administratif Selatan-Utara dan pengawas dalam proses pengembangan dari pariwisata Gunung Kumgang.

Dipilihnya Gunung Kumgang sebagai tempat kerjasama pariwisata adalah karena posisi yang strategis yang berada hampir diantara kedua Korea. Berdasarkan salah satu analisis, proyek Gunung Kumgang merupakan "*good bussiness*" yang potensial sebagai investasi jangka panjang, hal ini tergantung dari kemajuan yang substansial dari lingkungan inter Korea (Shinn, 2001). Dalam menentukan kerjasama, pemerintah Korea Selatan tidak serta-merta memilih tanpa melakukan pertimbangan sebelumnya. Melalui analisis tersebut, merupakan salah satu pertimbangan pemerintah Korea Selatan dalam menentukan lokasi dan melakukan negosiasi kerjasama dengan Korea Utara.

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Gunung Kumgang

Tahun	Jumlah Turis (orang)
1998-2000	371.637
2001	57.879
2002	84.727
Total	514.243

Diolah dari: *Inter Korean Exchange and Cooperation* dari laman resmi <http://eng.unikorea.go.kr>

Salah satu target dari pemerintah Korea Selatan adalah meningkatkan angka kunjungan ketempat pariwisata yang telah ditentukan. Targetnya sendiri adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat Korea pada umumnya untuk turut terlibat dan berkontribusi dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea. Salah satu kesulitannya adalah meyakinkan bahwa Korea Utara telah ramah wisatawan dan tidak terganggu dengan isu pengembangan senjata nuklir. Saling meyakinkan keamanan untuk saling mengunjungi negara satu sama lain.

Isu keluarga yang terpisah telah menjadi perhatian tersendiri oleh Kim Dae jung dan pemerintah Korea Selatan. Urgensi atas isu keluarga yang terpisah ini berkali-kali disampaikan oleh Korea Selatan baik dalam konferensi tingkat tinggi maupun pertemuan tingkat pemerintah. Pada bab sebelumnya telah disampaikan, hampir setiap pertemuan kedua Korea, Korea Selatan selalu mengupayakan ditambahkannya pertemuan atau reuni keluarga dalam satu tahun. Tentunya, masa pemerintahan Kim Dae Jung bukanlah awal dimulainya reuni keluarga. Pemimpin-pemimpin Korea Selatan sebelumnya juga telah mengupayakan pertemuan reuni keluarga ini, namun yang berbeda adalah mengikatnya jumlah pertemuan pada saat diberlakukannya *Sunshine Policy* oleh Kim Dae Jung.

Pada teks *South-North Joint Declaration* telah disampaikan pada poin ketiga bahwa,

The South and North have agreed to promptly resolve humanitarian issues such as exchange visits by separated family member and relatives on the occasion of the August 15 National Liberation Day and the question of former long-term prisoners who had refused to renounce Communism.

Pada poin tersebut disampaikan bahwa pihak Korea Selatan dan Korea Utara telah menyetujui untuk menyelesaikan isu kemanusiaan yaitu pertukaran pertemuan keluarga yang terpisah. Kim Dae Jung mengajukan proposal mengenai isu keluarga yang terpisah pada *Inter-Korean Summit* yang kemudian disepakati oleh kedua pemimpin negara dan dimasukkan dalam *South-North Joint Declaration*.

Tidak hanya menjadi perjanjian yang dalam *South-North Joint Declaration*, pada pertemuan level pemerintah seperti *Inter-Korean Ministerial Talks* pada pertemuan kedua juga menjadikan isu keluarga yang terpisah menjadi urgensi tersendiri. Pembahasan mengenai reuni keluarga yang terpisah disampaikan di *Joint Press Statement of the Second Inter-Korean Ministerial Talks* pada poin pertama.

South and Korea will hold two more round of reunions of separated families and relatives within this year. The two side will hold a new round of inter-Korean Red Cross Talks soon to discuss the details. At the planned Red Cross Talks, the two Korea will discuss matters related to separated families including exchange of letters.

Poin tersebut menyatakan bahwa, reuni keluarga yang terpisah akan diadakan tambahan pertemuan sebanyak 2 kali pada tahun yang sama. Detil dari kesepakatan ini akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan *Inter-Korean Red Cross Talks*. Hasil dari pertemuan *Inter-Korean Red Cross Talks* telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa (1) menyetujui untuk mengadakan secara serentak untuk pertukaran kunjungan anggota keluarga yang terpisah dari 15-18 Agustus, (2) menyetujui dalam prinsip menyusun dan mengoperasikan pusat reuni untuk keluarga yang terpisah, (3) menyetujui untuk mengembalikan seluruh tahanan jangka panjang yang belum dibebaskan yang berharap kembali ke Utara pada bulan September, (4) Menyetujui untuk mengadakan putaran kedua dari pertukaran kunjungan dari keluarga yang terpisah pada 2-4 November dan putaran ke ketiga pada 5-7 Desember 2000, (5) Akan mendiskusikan dan menyetujui proyek untuk menyusun dan mengoperasikan pusat reuni keluarga yang terpisah pada putaran ketiga dari *Red Cross Talks* (*Ministry of Unification*, 2001: 69-74).

Tabel 1.2 Jumlah Peserta Reuni Keluarga Yang Terpisah

Tahun	Jumlah (orang)
2000	2394

2001	1242
2002	1724

Diolah dari: *Humanitarian Cooperations* dari laman resmi <http://eng.unikorea.go.kr>

Bantuan luar negeri oleh Korea Selatan kepada Korea Utara merupakan salah satu bentuk implementasi dari kebijakan *Sunshine Policy*. Jika menelaah kembali pada bab sebelumnya, bahwa kebijakan *Sunshine Policy* memiliki 3 prinsip utama yang dijadikan landasan dalam pengimplementasian. Pertama, tidak ada toleransi terhadap provokasi militer oleh Korea Utara yang dapat merusak perdamaian di Semenanjung Korea. Kedua, Selatan tidak akan melakukan percobaan untuk menahan Utara. Ketiga, Selatan akan aktif mendukung rekonsiliasi dan kerjasama.

Bantuan luar negeri yang diberikan oleh Korea Selatan merupakan bentuk implementasi dari prinsip dasar *Sunshine Policy* pada poin ketiga sebagai bentuk sikap kooperatif dalam mendukung rekonsiliasi dan kerjasama. Implementasi *Sunshine Policy* telah dinilai sebagai sebuah institusionalisasi dari kerjasama ekonomi antara dua Korea (Jang, 2007). Hubungan inter Korea pada masa pemerintahan Kim Dae Jung memberikan dampak pada sejarah panjang Semenanjung Korea. Hubungan antara Selatan dan Utara didominasi oleh pendekatan *top-bottom*, karena sistem politik dari Korea Utara tidak mengizinkan bentuk negosiasi apapun yang berada diluar kontrol dari partai (Jang, 2007).

Pemerintahan Kim Dae Jung dan kebijakan *Sunshine Policy* menunjukkan sikap yang proaktif terhadap Korea Utara. Salah satu bentuk keseriusan Korea Selatan dalam rekonsiliasi dengan Korea Utara melalui bantuan kemanusiaan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk bantuan berupa uang dan barang, baik diberikan oleh pemerintah maupun oleh *Non Governmental Organizations* (NGOs) yang diberikan melalui pemerintah Korea Selatan. Pemerintah Kim Dae Jung mengurangi atau membatalkan berbagai macam regulasi yang menekan pada masa pemerintahan Kim Young Sun mengenai bantuan ke Korea Utara pada tataran masyarakat sipil, yang membuat NGOs memungkinkan untuk mengunjungi Korea Utara untuk menegosiasikan persyaratan untuk bantuan (Lee, 2009).

Tabel 1.3 Bantuan Langsung oleh Korea Selatan dan NGOs

Tahun	Jumlah (dalam 100 juta won Korea)
1998	429
1999	562
2000	2422

2001	1757
2002	3226

Diolah dari: *Humanitarian Cooperations* dari laman resmi <http://eng.unikorea.go.kr>

Tabel 1.4 Bantuan Kemanusiaan oleh Pemerintah Korea Selatan

Tahun	Pemerintah			
	Makanan		Pupuk	
	Uang*	Barang**	Uang*	Barang**
1998	-	-	-	-
1999	-	-	339 (462)	115.000
2000	1057	300.000 beras dan 200.000 jagung China	944	300.000
2001	-	-	638	200.000
2002	1510	400.000 ton beras lokal	832	300.000

Keterangan * = dalam ratusan juta won Korea (KRW)

** = dalam satuan Ton

Tabel 1.5 Bantuan Kemanusiaan oleh NGOs Melalui Pemerintah Korea Selatan

Tahun	NGOs				
	Lokal		Korean Red Cross*	Internasional	
	Jumlah NGOs	Jumlah angka*		World Food Programme (WFP)**	World Health Organization (WHO)**
1998	-	-	275	1100	-
1999	10	66	157	-	-
2000	12	274	113	-	-
2001	19	496	286	1725	46

2002	25	486	90	1739	59
-------------	-----------	------------	-----------	-------------	-----------

Keterangan * = dalam ratusan juta won Korea (KRW)
Amerika

**= dalam puluhan ribu dolar

Diolah dari: *Humanitarian Cooperations* dari laman resmi <http://eng.unikorea.go.kr>

Kebijakan *Sunshine Policy* memiliki tujuan yang sangat besar untuk memperkenalkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri pada Korea Utara melalui reformasi dan pembukaan pasar, yang akhirnya berkontribusi untuk reunifikasi Semenanjung Korea (Jang, 2007). Jika menilik kembali pada bab pertama penelitian ini, Hans Morgenthau mengatakan bahwa bantuan ekonomi memiliki motif dan tendensi pada kepentingan politik. Pada pernyataan tersebut, bantuan yang diberikan oleh Korea Selatan, dalam konteks bantuan ekonomi, harus menjadi *win-win solution* bagi kedua negara. Analoginya adalah bahwa Korea Selatan sebagai pemberi bantuan kepada Korea Utara, tidak serta-merta memberi namun bagaimana caranya Korea Selatan tidak dirugikan dan mendapat keuntungan baik secara politik maupun ekonomi. Keuntungan politik disini adalah meningkatkan keharmonisan hubungan diplomatik dengan Korea Utara dalam mengimplementasikan kebijakan *Sunshine Policy*. Tidak hanya keuntungan dari sisi politik, dari sisi ekonomi Korea Selatan tetap mengharapkan keuntungan yang maksimal. Maka dari itu, berdirilah *Kaesong Industrial Complex* (KIC).

KIC sendiri didirikan pada tahun 1998 di tenggara kota Pyongyang, yang tepatnya berjarak 106 mil kearah tenggara dan berjarak 43 mil dari utara Seoul yang hanya berada diseberang dari DMZ. KCI merupakan inisiatif dan langkah berani oleh sektor privat yaitu grup Hyundai, yang pada pembangunannya bertepatan dengan kebijakan Korea Selatan *Sunshine Policy*. Menurut Patrick M. Cronin (2012) bahwa *master plan* asli dinegosiasikan oleh Hyundai Asan dan pemerintah Korea Selatan melalui 3 fase. Fase pertama adalah 800 hektar, 300 perusahaan, 70000 pekerja dan akan dilengkapi pada tahun 2007. Fase kedua adalah dengan menambahkan 1225 hektar, menjadi 700 perusahaan, 130000 pekerja dan akan diselesaikan pada tahun 2009. Fase ketiga adalah menambahkan 3000 hektar, menjadi 1000 perusahaan, 150000 pekerja, dan akan diselesaikan pada tahun 2012. Namun meskipun diinisiasi oleh sektor privat dan setelah dijalankannya kebijakan *Sunshine Policy*, KCI mendapatkan intervensi yang besar dari pemerintahan Korea Selatan dan Korea Utara. Tujuan dari KIC adalah sebagai pemusatan oleh Korea Selatan untuk membangun kompleks perindustrian yang memungkinkan untuk menghasilkan produk menggunakan tenaga kerja atau buruh dari Korea Utara dan menyediakan pembukaan untuk proses liberalisasi Korea Utara (Nanto dan Manyin, 2007).

Presiden Bush memberikan respon penolakan terhadap pertanda yang diberikan oleh Kim Dae Jung atas titik balik koordinasi kebijakan terhadap Korea Utara yang menggagalkan upaya Kim Dae Jung untuk menggunakan dukungan internasional untuk menekan Korea Utara agar menghadiri konferensi tingkat tinggi di Seoul, dengan seperti ini, tidak akan ada pemecahan strategi lebih lanjut dalam implementasi kebijakan lebih lanjut (Scott dalam Rozman *et al*, 2008: 86). Implementasi kebijakan *Sunshine Policy* dihadapkan pada akhir yang diikuti berakhirnya masa kepemimpinan Kim Dae Jung. Pada tahun 2002, presiden Kim Dae Jung resmi turun jabatan dan digantikan oleh presiden baru Roh Moo Hyun yang kembali menduduki kepemimpinan Korea Selatan. Dengan ini, berakhirilah kebijakan *Sunshine Policy* sebagai kebijakan yang dianggap sebagai cahaya harapan perdamaian Semenanjung Korea.

Kesimpulan

Perkembangan hubungan bilateral Korea Selatan dan Korea Utara memiliki dinamika yang tidak stabil pasca Perang Korea. Kedua pemimpin Korea tidak pernah bertemu secara resmi sejak Perang Korea hingga pada kepemimpinan Presiden Kim Young Sam. Tensi militer terus mengiringi proses reunifikasi Semenanjung Korea. Pengembangan dan uji coba senjata nuklir kerap dijadikan ancaman oleh Korea Utara kepada Korea Selatan dan internasional. Hingga pada tahun 1998, dengan terpilihnya Kim Dae Jung sebagai Presiden Korea Selatan dan mencanangkan kebijakan luar negeri Korea Selatan yaitu *Sunshine Policy*. Kim Dae Jung menggadang-gadang bahwa kebijakan *Sunshine Policy* akan mampu menyatukan kembali Semenanjung Korea.

Melalui analisis dan olah data pada bab-bab sebelumnya, kebijakan *Sunshine Policy* merupakan titik balik hubungan Korea Selatan dan Korea Utara sejak terpisahnya Semenanjung Korea. Kim Dae Jung merupakan Presiden Korea Selatan yang berorientasi pada isu reunifikasi dan mencetuskan *Sunshine Policy* sebagai gagasan dari upaya reunifikasi. Penulis menilai bahwa kebijakan *Sunshine Policy* merupakan bentuk dan hasil dari gagasan reunifikasi dan *strategic moves* dari Kim Dae Jung yang kemudian diimplementasikan selama masa pemerintahannya. *Strategic moves* sendiri adalah tentang bagaimana mengambil sikap untuk negosiasi dalam konflik. Berdasarkan hal tersebut, *Sunshine Policy* merupakan bentuk dari pengambilan sikap Kim Dae Jung untuk mencapai negosiasi dalam konflik di Semenanjung Korea.

Berdasarkan pengujian hipotesis di atas, dapat dibuktikan dan dikaji bahwa implementasi kebijakan *Sunshine Policy* melalui *track one diplomacy*, *soft power*, dan *foreign aid*. Implementasi kebijakan *Sunshine Policy* dengan *track one diplomacy* adalah melalui diadakannya konferensi tingkat tinggi (*Inter-Korean Summit*) dan pertemuan-pertemuan level pemerintah oleh Korea Selatan dan Korea Utara. Pada pertemuan-pertemuan ini, menghasilkan *South-North Agreement* dan *South-North Joint Declaration* yang dijadikan acuan dalam pembuatan perjanjian lainnya dan implementasi kebijakan *Sunshine Policy*. Implementasi kebijakan *Sunshine Policy* selanjutnya adalah melalui *soft power*. *Soft power* yang diimplementasikan oleh Korea Selatan adalah melalui kerjasama pembangunan pariwisata dan meningkatkan jumlah pengunjung di Gunung Keumgang serta peningkatan rasio pertemuan keluarga yang terpisah. Implementasi kebijakan *Sunshine Policy* yang terakhir adalah dengan pemberian *foreign aid* oleh Korea Selatan. Bantuan yang diberikan oleh Korea Selatan dibagi menjadi 2 jenis yaitu bantuan kemanusiaan (*humanitarian aid*) dan bantuan pembangunan ekonomi (*economic development aid*). Bantuan yang diberikan adalah berupa uang dan barang baik murni dari pemerintah maupun dari NGOs yang dihimpun oleh pemerintah. Selain hal tersebut, Korea Selatan membangun *Kaesong Industrial Complex* dan *grand design* dari pembangunan *railway* dan *highway* yang menghubungkan Selatan dan Utara.

Kebijakan *Sunshine Policy* memberikan jalan terang pada proses reunifikasi Semenanjung Korea, mengingat adanya respon positif dan proaktif dari Korea Utara. Namun pada detik-detik akhir masa jabatan Kim Dae Jung, hubungan diplomatik di Semenanjung Korea kembali memanas. Hal ini dipicu oleh skandal pribadi Kim Dae Jung, mulai dibentuknya *Six Party Talks*, mulai turut campurnya Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Presiden Bush. Dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Kim Dae Jung, maka berakhirilah *Sunshine*

Policy yang sempat membawa perdamaian hakiki di Semenanjung Korea. Kebijakan *Sunshine Policy* telah gagal membawa perdamaian absolut dan harapan reunifikasi Semenanjung Korea secara utuh.

Daftar Pustaka

- Berridge, G. R. dan Alan James. *A Dictionary of Diplomacy (second edition)*. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- Dahl, Robert A. “*Modern Political Analysis, Englewood Cliffs (2nd ed)*”. Dalam *International Relations*. Washington D. C. : American University, 2004.
- In, Taek Hyun. “*South Korean Strategic Thought Toward Asia in the Kim Young Sam Era*” dalam *South Korean Strategic Thought Toward Asia*. New York: Pargrave Macmillan, 2008.
- Jong, Yun Bae dan Gilbert Rozman. “*South Korean Strategic Thought Toward Asia on Reunification*” dalam *South Korean Strategic Thought Toward Asia*. New York: Pargrave Macmillan, 2008.
- Krik, Donald dan Kim Kisam. *Kim Dae Jung and the Quest for the Nobel: How the President of South Korea Bought the Peace Prize and Financed Kim Jong Il's Nuclear Program*. New York: Pargrave Macmillan, 2013.
- Ministry of Unification. *Peace and Cooperation: White Paper on Korea Unification*. Republic of Korea: Ministry of Unification, 2001.
- Nye, Joseph S. *Soft Power: The Means to Succes in World Politics. United States of America: PublicAffairs*, 2004.
- Rourke, John T. *Level of analysis and Foreign Policy in International Politics On the World stage*. New York: Mcgraw-Hill International edition, 2009.
- Rozman, Gilbert, *et al.* *South Korean Strategic Thought Toward Asia*. New York: Pargrave Macmillan, 2008.
- Snyder, Scott. *Strategic Thought Toward Asia in the Kim Dae Jung Era*” dalam *South Korean Strategic Thought Toward Asia*. New York: Pargrave Macmillan, 2008.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian, edisi ke-23*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Seth, Michael J. *A Concise History of Modern Korea: From the Late Nineteenth Century*. United of America: Rowman and Littlefield Publishers, Inc, 2010.
- Referensi daring:
- Alden, C. “*Foreign Policy Analysis*”, 2011. daring http://www.londoninternational.ac.uk/sites/default/files/programme_resources/lse/lse_pdf/subject_guides/ir2137_ch1-3.pdf diakses pada tanggal 15 Maret 2017
- Chong, Alan. “*The Foreign Policy Potential of Small State Soft Power Information Strategies*”, 2007. Daring <http://www.eisa-net.org/be-bruga/eisa/files/events/turin/Chong-ALAN%20CHONG%202007%20The%20Foreign%20Policy%20Potential%20of%20Small%20State%20Soft%20Power.pdf> diakses pada tanggal 18 Februari 2017
- Cronin, Patrick M. “*Vital Venture: Economic Engagement of North Korea and the Kaesong Industrial Complex*”, 2012. Daring

- https://www.files.ethz.ch/isn/144324/CNAS_VitalVenture_Cronin_0.pdf
diakses pada 9 Mei 2017
- Hermann, Chares F. “*Foreign Policy*”, t.t. Daring
<http://www.voxprof.com/cfh/hermann-pubs/Hermann-Foreign%20Policy.pdf> diakses pada tanggal 15 Maret 2017
- Jang, Tae Seok. “*South Korea’s Aid to North Korea’s Transformation Process: Social Market Perspective*”, 2007. Daring http://www.ordnungspolitisches-portal.com/Diskurse/Diskurse_2007-06.pdf diakses pada 8 Mei 2017
- Keukeleire, Stephan dan Simon Schunz. “*Foreign Policy, Globalization And Global Governance : The European Union’s Structural Foreign Policy*”, 2008. Daring <http://www.jhubc.it/ecpr-riga/virtualpaperroom/102.pdf> diakses pada tanggal 15 Maret 2017
- Kim, Ji Yoon, Karl Friedhoff, Kang Chung Ku, dan Lee Eui Cheol. “*South Korean Attitudes Toward North Korea and Reunification*”, 2015. Daring http://thediplomat.com/wp-content/uploads/2015/01/thediplomat_2015-01-29_13-53-09.pdf diakses pada 7 Mei 2017
- Knupfer, Nancy Nellson dan Hilary Mclellan. “*Descriptive Research Methodologies*”, t.t. Daring <http://www.aect.org/edtech/ed1/pdf/41.pdf> diakses pada tanggal 22 Maret 2017
- Koh, B. C. “*Seoul Domestic Policy and the Korean-American Alliance*”, 1999. Daring <https://fsi.stanford.edu/sites/default/files/Koh3PM.pdf> diakses pada tanggal 7 Maret 2017
- Kolb, Deborah M. “*Strategic Move and Turn*”, t.t. Daring http://apps.americanbar.org/abastore/products/books/abstracts/4740062chap46_abs.pdf diakses pada tanggal 12 Februari 2017
- Kwon, Pearl Jinju. “*The Re-Evaluation of The Sunshine Policy: Failure or Success?*”, 2014. Daring <http://www.lse.ac.uk/IPA/images/Documents/PublicSphere/2014/7-Kwon-Sunshine.pdf> diakses pada tanggal 6 Februari 2017
- Lee, Jong Moo. “*The History of South Korean Aid to DPRK and Its Transition to Development Assistance: Aid to DPRK in the Context of the Inter-Korean Relationship*”, 2009. Daring http://www.ncnk.org/resources/publications/Humanitarian-Conf-2009_Lee-Jong-Moo_ROK_Aid_to_Devt_Transition.pdf diakses pada 7 Mei 2017
- Madani, Kaveh. “*Game Theory and Water Resource*”, 2009. Daring [https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/necom-dam/documents/Applied%20Negotiation%20Seminar%20\(HS%202016\)/10_Madani_Game_theory_and_water_resources.pdf](https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/necom-dam/documents/Applied%20Negotiation%20Seminar%20(HS%202016)/10_Madani_Game_theory_and_water_resources.pdf) diakses pada 12 Februari 2017
- Mapendere, Jeffrey. “*Defining Track One and Half Diplomacy: Its Complementarity and the Analysis of Factor that Facilitate Its Success*”, 2001. Daring <http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/mq64769.pdf> diakses pada tanggal 15 Februari 2017
- McDonald, John W. “*Multi-Track Diplomacy: A Positive Approach to Peace Track-By-Track Case Studies*”, 2014. Daring < <http://imtd.org/papers/OP%2022%20Multi->

- [Track%20Diplomacy%20A%20Positive%20Approach%20to%20Peace%20Track-By-Track%20Case%20Studies.pdf](#)> diakses pada 15 Februari 2017
- Morgenthau, Hans. “*A Political Theory of Foreign Aid*”, 1962. Daring https://48f2ef7a-a-62cb3a1a-sites.googlegroups.com/site/mastercoopint2/TeoriaRRII-Morgenthau_A_theory_of_Foreign_Aid_1962%5B1%5D.pdf?attachauth=ANoY7coG_JZOoo5YUD7kvr3m5ov6VMWpXr_MSfAVKQa_n7M5jJ3XzhH8TlrzIddOXAtH0CX-HYmYRPHIAxwMMb_RD5MqNdeFVCwGcj-4YhlKg3DkZ6bEhfsuN0maAJwnogaCEu2tx7a8Sm6pwcjP2NX21AvktOCj4RoueRwnzt5nejIFFQ7L1mgsaNr7OwuPA0jD1BwNQZ5vbfJstRCOI-hIG0fNSwom9wZ4HOxG4xi_vBxyHqB9mbtPr0KkX3oHUrqwZ1WZXVjeB8WmFQcyjwVoPdgh26Q6NA%3D%3D&attredirects=0 diakses pada tanggal 15 Maret 2017
- Nan, Susan Allen. “*Track One Diplomacy*”, 2013. Daring <http://www.beyondintractability.org/essay/track1-diplomacy> diakses pada 15
- Nanto, Dick K. dan Mark E. Manyin. “*The Kaesong North-South Korean Industrial Complex*”, 2007. Daring <http://japanfocus.org/data/crs.kaesong.pdf> diakses pada 8 Mei 2017
- Narducci, Tiffany. “*The Ethics of Choice: How Foreign Aid Only Benefits Us*”, 2014.
- Oecd. t.t. “*Official Development Assistance (ODA): Definition and Coverage*”, 2016. Daring <http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm>
- Shinn, Rinn Sup. “*South Korea: Sunshine Policy and Its Political Context*”, 2007. Daring https://www.everycrsreport.com/files/20010212_RL30188_7408229a612868dd581c1b11219b806791ae5d53.pdf
- Singer, J. David. “*Review: International Conflict: Three Levels of Analysis*”, 2007. Daring http://sitemaker.umich.edu/jdsinger/files/international_conflict_3_levels_of_analysis.pdf diakses pada tanggal 15 Februari 2017
- Qian, Nancy. “*Making Progress on Foreign Aid*”, 2014. Daring http://aida.wss.yale.edu/~nq3/NANCYS_Yale_Website/resources/papers/Aid_20140816_FINAL.pdf diakses pada tanggal 18 Februari 2017